

**Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Bos Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Publik  
(Studi Kasus: SD Negeri 2 Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan)**

***Analysis Of the Implementation Of Good Governance Principles In The Management Of Bos Funds As An Effort To Enhance Public Accountability  
(Case Study: SD Negeri 2 Samuda, Daha Selatan District, South Hulu Sungai Regency)***

**Muhammad Andri<sup>a\*</sup>, Muhammad Aldy Hidayatullah<sup>b</sup>**

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Lambung Mangkurat<sup>a</sup>  
Guru Sejarah, SMA Negeri 1 Daha Utara<sup>b</sup>  
<sup>a</sup>artrjf@gmail.com, <sup>b</sup>aldyhidayat69@gmail.com

**Abstract**

*The management of School Operational Assistance (BOS) funds plays a crucial role in supporting the quality of education; however, it still faces challenges related to transparency, accountability, and participation. This study aims to analyze the implementation of good governance principles in BOS fund management, identify the challenges encountered, and assess their contribution to improving public accountability at SD Negeri 2 Samuda. This research employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the principal, BOS treasurer, and school committee. The findings indicate that the implementation of good governance principles has been carried out but has not yet been fully optimal. Transparency remains limited to internal stakeholders, community participation is still low, and constraints include limited human resources and weak administrative systems. Nevertheless, the implementation contributes positively to improving public accountability.*

**Keywords:** Good Governance; BOS Funds; Public Accountability

**Abstrak**

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek penting dalam mendukung kualitas pendidikan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Dana BOS, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas publik di SD Negeri 2 Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, serta komite sekolah sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance telah dilaksanakan melalui aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi, namun belum sepenuhnya optimal. Transparansi masih terbatas pada lingkup internal sekolah, partisipasi masyarakat belum aktif, serta terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman regulasi, dan sistem administrasi yang belum optimal. Meskipun demikian, implementasi prinsip good governance memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas publik.

**Kata Kunci:** Good Governance; Dana BOS; Akuntabilitas Publik; Transparansi

**1. Pendahuluan**

Dalam konteks global, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Berbagai negara terus meningkatkan alokasi anggaran

pendidikan sebagai upaya untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran. Namun demikian, peningkatan anggaran tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas output pendidikan apabila tidak didukung oleh sistem tata kelola yang baik (Sulasmi et al., 2023). Oleh karena itu, isu *good governance* menjadi sangat penting dalam pengelolaan dana pendidikan, terutama dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Di Indonesia, salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dasar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung kegiatan operasional sekolah, seperti pengadaan sarana pembelajaran, pembiayaan kegiatan akademik, hingga peningkatan mutu tenaga pendidik. Program ini dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat sekaligus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan secara merata (Nirmalasari et al., 2025). Dengan cakupan yang luas dan nilai anggaran yang signifikan, dana BOS menjadi salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan nasional yang menuntut pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pengelolaan dana BOS di berbagai satuan pendidikan masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Transparansi yang rendah menyebabkan terbatasnya akses informasi bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan orang tua siswa, sehingga menghambat fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik (Rizka et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan informasi belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam praktik pengelolaan dana BOS.

Selain masalah transparansi, potensi penyalahgunaan dana BOS juga menjadi isu yang sering ditemukan dalam berbagai penelitian. Penyimpangan penggunaan dana, seperti penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau manipulasi laporan keuangan, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan pengawasan eksternal (Pitaloka et al., 2026; Taihuttu & Yanti, 2025). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan sebagai pengelola dana publik.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik yang menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana BOS masih relatif rendah, yang disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem pelaporan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan (Batubara et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam konteks tersebut, konsep *good governance* menjadi pendekatan yang relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana BOS. Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pendidikan (Rahayu et al., 2025). Implementasi prinsip-prinsip ini diyakini mampu meminimalisir potensi

penyalahgunaan dana serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

Lebih lanjut, penerapan *good governance* memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan akuntabilitas publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait penggunaan dana, sehingga mendorong terciptanya pengawasan sosial yang lebih efektif. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik (Hidayah et al., 2026). Dengan demikian, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana BOS tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Namun demikian, implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pengelolaan dana secara rinci, praktik di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Destia & Silviana, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan implementasinya di tingkat sekolah, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kapasitas manajerial, budaya organisasi, serta efektivitas sistem pengawasan.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek administratif atau evaluasi kebijakan secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitan antara implementasi prinsip *good governance* dengan peningkatan akuntabilitas publik dalam konteks spesifik di tingkat sekolah dasar. Padahal, setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga implementasi kebijakan dapat menghasilkan dampak yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih kontekstual dan mendalam untuk memahami dinamika implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap*, yaitu masih terbatasnya penelitian yang secara komprehensif menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana BOS serta keterkaitannya dengan peningkatan akuntabilitas publik pada tingkat satuan pendidikan dasar. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji fenomena tersebut secara spesifik dalam konteks lokal, khususnya di SD Negeri 2 Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis empiris yang lebih mendalam dan kontekstual terkait implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana BOS sebagai upaya peningkatan akuntabilitas publik.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial, khususnya terkait implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS di tingkat satuan pendidikan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi variabel penelitian. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif dinamika implementasi kebijakan dalam konteks yang spesifik dan terbatas pada satu lokasi penelitian. Menurut Yin (2018), studi kasus sangat relevan digunakan untuk memahami fenomena kontemporer

dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap interaksi antar aktor dalam pengelolaan dana publik secara lebih mendalam (Creswell & Poth, 2016). Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kaya, kontekstual, dan bermakna.

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Samuda yang terletak di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu penerima Dana BOS yang secara aktif mengelola anggaran operasional pendidikan sesuai dengan regulasi pemerintah. Selain itu, sekolah ini memiliki karakteristik yang representatif dalam menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah dasar, khususnya di daerah.

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman informasi dibandingkan dengan generalisasi. Dengan memilih lokasi yang relevan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih akurat mengenai praktik pengelolaan Dana BOS di tingkat satuan pendidikan. Konteks lokal yang spesifik juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi implementasi prinsip *good governance* secara lebih mendalam.

Dengan demikian, lokasi penelitian ini dinilai tepat dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan penelitian. Melalui pemilihan lokasi yang sesuai, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya kontekstual, tetapi juga memiliki nilai kontribusi dalam pengembangan pengelolaan dana pendidikan yang transparan, akuntabel, dan efektif di lingkungan sekolah dasar

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### Implementasi Good Governance

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 2 Samuda dianalisis melalui indikator transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut telah diupayakan dalam praktik pengelolaan, namun belum sepenuhnya optimal pada seluruh aspek.

##### 1. Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana BOS telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan serta penyampaian informasi kepada pihak internal sekolah. Laporan penggunaan dana tersedia dan dapat diakses oleh pihak tertentu seperti guru dan komite sekolah, namun publikasi kepada masyarakat luas masih terbatas. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan:

*"Kami sudah membuat laporan penggunaan Dana BOS setiap tahap, tetapi belum semua informasi dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, biasanya hanya disampaikan kepada guru dan komite sekolah."* (Wawancara dengan Bendahara BOS)

Selain itu, keterbatasan akses informasi juga dirasakan oleh pihak eksternal:

*"Informasi terkait penggunaan dana memang ada, tetapi tidak selalu dipasang di papan pengumuman, sehingga orang tua siswa tidak semuanya mengetahui secara detail."* (Wawancara dengan Komite Sekolah)

Secara teoretis, transparansi merupakan prinsip utama dalam *good governance* yang memungkinkan akses informasi publik guna meningkatkan pengawasan sosial. Kurangnya keterbukaan informasi dapat menghambat partisipasi masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat internal-administratif dan belum sepenuhnya eksternal-partisipatif.

## 2. Akuntabilitas

Dalam aspek akuntabilitas, sekolah telah melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS melalui penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan. Hal ini ditegaskan oleh informan:

*"Setiap penggunaan Dana BOS kami pertanggungjawabkan melalui laporan yang dikirim ke dinas pendidikan sesuai dengan juknis yang berlaku."* (Wawancara dengan Kepala Sekolah)

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan pelaporan:

*"Kami berusaha menyusun laporan sesuai aturan, tetapi terkadang mengalami keterlambatan karena keterbatasan waktu dan tenaga."* (Wawancara dengan Bendahara BOS)

Secara teoretis, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas formal telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dari sisi ketepatan waktu dan kualitas pelaporan.

## 3. Partisipasi

Partisipasi dalam pengelolaan Dana BOS terlihat melalui keterlibatan komite sekolah dalam proses perencanaan anggaran. Hal ini disampaikan oleh informan:

*"Komite sekolah biasanya dilibatkan dalam rapat perencanaan anggaran, tetapi tidak semua keputusan melibatkan masyarakat secara langsung."* (Wawancara dengan Kepala Sekolah)

Namun demikian, partisipasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum optimal: *"Peran komite ada, tapi lebih banyak sebagai formalitas, belum sampai pada pengawasan yang aktif terhadap penggunaan dana."* (Wawancara dengan Guru)

Dalam perspektif *good governance*, partisipasi yang efektif tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus memberikan ruang nyata bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masih berada pada level normatif dan belum substantif.

## 4. Efektivitas dan Efisiensi

Penggunaan Dana BOS secara umum telah mendukung kegiatan operasional sekolah dan kebutuhan pembelajaran. Hal ini tercermin dari pernyataan informan:

*"Dana BOS sangat membantu kegiatan sekolah, terutama untuk pembelian alat pembelajaran dan kebutuhan operasional lainnya."* (Wawancara dengan Guru)

Namun, masih terdapat kendala dalam perencanaan anggaran:

*"Penggunaan dana sudah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, tetapi kadang perencanaan masih perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran."* (Wawancara dengan Bendahara BOS)

Secara teoretis, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sudah cukup baik, namun efisiensi masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan yang lebih matang.

### **Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Good Governance**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam implementasi prinsip *good governance*. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal kompetensi pengelolaan keuangan. Hal ini diungkapkan oleh informan:

*“Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.”* (Wawancara dengan Kepala Sekolah)

Selain itu, minimnya pemahaman terhadap regulasi juga menjadi hambatan:

*“Kami masih mengalami kesulitan dalam memahami beberapa aturan teknis pengelolaan Dana BOS yang sering berubah.”* (Wawancara dengan Bendahara BOS)

Kendala lainnya adalah sistem administrasi yang belum optimal, sehingga mempengaruhi kualitas pelaporan. Secara teoretis, kapasitas sumber daya manusia dan sistem kelembagaan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek internal organisasi masih menjadi tantangan utama dalam penerapan *good governance*.

### **Dampak Implementasi terhadap Akuntabilitas Publik**

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas publik. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran pengelola sekolah dalam menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

*“Dengan adanya aturan yang jelas, kami menjadi lebih tertib dalam pengelolaan dana, meskipun masih perlu peningkatan dalam transparansi.”* (Wawancara dengan Kepala Sekolah)

Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek keterlibatan masyarakat:

*“Akuntabilitas sudah mulai meningkat, tetapi masyarakat masih belum sepenuhnya terlibat dalam pengawasan.”* (Wawancara dengan Komite Sekolah)

Secara teoretis, akuntabilitas publik tidak hanya ditentukan oleh sistem pelaporan formal, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, meskipun terdapat peningkatan akuntabilitas, masih diperlukan upaya untuk memperkuat transparansi dan partisipasi guna mencapai tata kelola yang lebih baik.

## **5. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 2 Samuda telah dilaksanakan melalui aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi, namun belum sepenuhnya optimal. Transparansi telah dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan, tetapi masih terbatas pada akses internal dan belum terbuka secara luas kepada masyarakat. Akuntabilitas telah berjalan melalui mekanisme pelaporan kepada pemerintah, meskipun masih terdapat kendala dalam ketepatan waktu dan

kualitas pelaporan. Partisipasi stakeholder seperti komite sekolah telah dilibatkan dalam perencanaan, namun masih bersifat formalitas dan belum aktif dalam pengawasan. Sementara itu, efektivitas penggunaan Dana BOS sudah cukup baik dalam mendukung kegiatan operasional sekolah, meskipun efisiensi masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan anggaran yang lebih optimal. Dengan demikian, implementasi prinsip *good governance* telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi dan partisipasi.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *good governance* meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang sering berubah, serta sistem administrasi yang belum optimal. Kendala-kendala tersebut berdampak pada belum maksimalnya kualitas pengelolaan dan pelaporan Dana BOS. Meskipun demikian, implementasi prinsip *good governance* memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas publik, yang ditunjukkan melalui meningkatnya kesadaran pengelola sekolah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara lebih tertib dan sistematis. Namun, peningkatan akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan transparansi dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

## 6. Daftar Pustaka

- Batubara, E. D., Nursidin, M., Sijauta, D., Ventiany, D., & Hasan, T. (2025). Improving Bos Fund Accountability Through ARKAS, Internal Control and Strengthened by Transparency. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 15(4).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Destia, S., & Silviana, S. (2025). The Effect of Good School Governance Implementation on BOS Fund Management with Human Resource Competence as a Moderating Variable: An Empirical Study at Senior and Vocational High Schools in Subang Regency. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(2), 850–860.
- Hidayah, J., Murniyanto, M., & Baron, M. (2026). Transparency and Public-Private Collaboration as Solutions to Improve Education Budget Efficiency for Enhancing Education Quality in Indonesia. *Journal of Education and Religious Studies*, 6(01), 18–31.
- Nirmalasari, A., Sukowati, P., & Adi, D. S. (2025). Management of School Operational Assistance Funds (Policy Implementation Study of the Minister of Education and Culture Regulation). *ABM: International Journal of Administration, Business and Management*, 7(2), 174–182.
- Pitaloka, D. A., Prasetyo, Y., & Mahardhani, A. J. (2026). Kajian Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana BOS: Pertanggungjawaban Pidana, Efektivitas Regulasi, dan Rekomendasi Kebijakan: Criminal Law Review of BOS Fund Misuse: Criminal Liability, Regulatory Effectiveness, and Policy Recommendations. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 6(01), 102–114.
- Rahayu, S., Yudi, Sofyan, Rahayu, & Jumaili, S. (2025). Enhancing good governance and fraud prevention for school performance. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2534097. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2534097>
- Rizka, A. F., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Accountability and Transparency of Boss Funds: An Overview of Financial Management in Public Schools. *Journal of English Language and Education*, 10(4), 377–382.

- Sulasmi, E., Prasetia, I., & Rahman, A. A. (2023). Government policy regarding education budget on the posture of the state budget (APBN). *Journal for Lesson and Learning Studies*, 6(1), 142–151.
- Taihuttu, A. L., & Yanti, Y. (2025). The Mystery of Misuse of School Operational Assistance Funds: An in Depth Analysis Using The Fraud Hexagon. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(3), 815–826.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA.